

Yusuf Serahkan Bukti Ancaman ke Polisi

JAKARTA — Politikus senior sekaligus pendiri Partai Keadilan (kini Partai Keadilan Sejahtera), Yusuf Supendi, kembali mendatangi Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI kemarin. Kedatangannya kali ini untuk melengkapi laporan sehari sebelumnya ihwal dugaan fitnah yang dilakukan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq terhadap Yusuf.

"Kami bawa beberapa bukti, seperti telepon genggam dan sebagainya," kata pengacara Yusuf, Ahmad Rivai, di Mabes Polri kemarin. Menurut dia, pesan singkat yang dikirim Luthfi berupa tuduhan bahwa Yusuf bersama Badan Intelijen Negara berusaha menjatuhkan partai. Pesan singkat itu dikirim Luthfi pada 5 Juli 2010 pukul 22.11 WIB. "Kami melengkapi laporan bila LHI melakukan fitnah, intimidasi, dan pencemaran nama baik," ujarnya.

Selain itu, menurut Rivai, kliennya mendapat sejumlah pesan ancaman. Misalnya, ancaman mengosongkan rumah dan penorehan tanda silang berwarna merah di bagian depan rumah Yusuf. Laporan Yusuf resmi diterima Direktorat I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri dengan nomor 195/III/2011.

Yusuf yakin, pesan-pesan singkat itu berasal dari nomor Luthfi. Sebab, nomor itulah yang biasa dipakai yang bersangkutan. Pesan singkat yang meminta Yusuf keluar dari rumahnya dikirim pada 15 Juni 2010 dari nomor 0816940XXX. "Ada juga pesan singkat seluruh kader PKS dilarang menghubungi saya," kata Yusuf.

Ihwal jumlah pesan singkat yang diterima, Yusuf mengaku tak dapat memastikan. Namun, berdasarkan hasil cetakan yang diserahkan ke penyidik, pesan itu termuat dalam 143 lembar kertas.

Saat dimintai konfirmasi, Presiden PKS Luthfi Hasan enggan berkomentar soal laporan Yusuf ini. "Saya tidak akan berkomentar soal itu," kata dia saat dihubungi kemarin.

● CORNILA DESYANA | AMIRULLAH

KPK: RUU Tipikor Lemahkan Pemberantasan Korupsi

"Setiap masukan dan usulan untuk perbaikan, kita terima," kata staf presiden.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melemahkan agenda nasional pemberantasan korupsi. Sebab, di dalamnya terkandung sejumlah pasal yang muatannya tak lebih bagus dibanding undang-undang antikorupsi yang sekarang berlaku dan akan direvisi.

"RUU Tipikor harus lebih sempurna dari yang sudah ada. Bila pasal-pasal itu tidak berubah, buramalah potret pemberantasan korupsi Indonesia ke depan," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin saat dihubungi kemarin. Sekadar contoh, ia menyebutkan

keberadaan pasal 52, yang mengatur bahwa korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp 25 juta bisa dilepas dari tuntutan hukum. "Itu akan menyuburkan korupsi kecil di layanan publik," kata Jasin.

Adapun pasal 32 dinilai melemahkan KPK karena tidak menyebutkan adanya kewenangan penuntutan bagi lembaga ini. Menurut Jasin, ketentuan itu jelas memangkas kewenangan komisi antikorupsi. Ia khawatir pasal itu membuat proses penuntutan akan sekadar bolak-balik antara KPK dan kejaksaan. "Pemberantasan korupsi akan lambat dan sulit seperti yang dulu lagi," ujar Jasin.

Dalam urusan ini, Ahad lalu, Indonesia Corruption Watch mencatat ada sembilan norma yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi dalam RUU Tipikor. Selain yang su-

dah disebutkan Jasin, ada kelemahan lain, seperti hilangnya ancaman hukuman mati, hilangnya pasal tentang kerugian negara, dan hilangnya ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal. ICW juga menemukan pasal yang potensial mengkriminalkan pelapor kasus korupsi.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana, menyatakan pemerintah siap menerima masukan untuk memperbaiki draf RUU Tipikor. Perubahan masih mungkin dilakukan karena belum menjadi draf final dari pemerintah. "Setiap masukan dan usulan untuk perbaikan kita terima, termasuk pandangan dari ICW," kata Denny.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung berjanji

akan melibatkan publik dalam proses pembahasan RUU Tipikor jika sudah sampai ke Dewan. "Kalau masalah korupsi, tentu ICW jadi sarana representasi dari suara publik," kata Pramono di Semarang kemarin. Selain itu, Forum Rektor layak dilibatkan karena mereka juga kritis terhadap masalah korupsi di Tanah Air.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, draf RUU Tipikor tersebut saat ini masih tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Rencananya, paling lambat dua bulan mendatang draf tersebut akan rampung. "Satu-dua bulan lagi. Itu harus dipersiapkan betul. Belum ke presiden, masih di Kemendikham," kata dia di gedung DPR, Senin lalu.

● RIRIN AGUSTIA | EKO ARI | MUNAWWAROH | ROFIUDDIN | DWI WIYANA

IKLAN



PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASI 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

AKTIVA			KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
	2010	2009		2010	2009
AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR		
KAS DAN SETARA KAS	206.585	337.162	HUTANG USAHA	45.954	49.884
PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA	216.394	91.685	HUTANG PAJAK	56.082	191.544
PIUTANG LAIN-LAIN:	4.842	2.663	HUTANG LAIN-LAIN:		
PERSEDIAAN			Pihak ketiga	202.736	90.310
Setelah dikurangi penyisihan persediaan			Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	14.136	15.814
slow-moving sebesar Rp 5.115 juta pada tahun			HUTANG DIVIDEN:		
2010 dan Rp 5.218 juta pada tahun 2009	101.153	110.497	Pihak ketiga	4.195	45.146
BIAYA DIBAYAR DI MUKA	47.110	14.200	Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	193.574
AKTIVA LANCAR LAIN-LAIN	21.157	5.275	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	141.201	94.386
JUMLAH AKTIVA LANCAR	597.241	561.482	JAMINAN EMBALASI	162.374	146.593
			INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF	5.348	24.943
AKTIVA TIDAK LANCAR			JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	632.026	852.194
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN, bersih	6.069	5.661	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
AKTIVA TETAP			KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN, bersih	26.679	29.533
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan			PENYISIHAN UNTUK IMBALAN KERJA	7.009	6.395
sebesar Rp 500.872 juta dan penyisihan			JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	33.688	35.928
penurunan nilai aktiva sebesar Rp 14.311 juta			HAK MINORITAS	147	132
pada tahun 2010 (2009: Rp 421.963 juta dan			EKUITAS		
Rp 2.495 juta)	528.879	420.864	MODAL SAHAM, nilai nominal Rp 1.000 per saham:		
AKTIVA TAK BERWUJUD			Modal dasar, telah ditempatkan dan		
Setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp 13.602			disetor penuh 21.070.000 saham	21.070	21.070
juta pada tahun 2010 dan Rp 12.788 pada tahun 2009	30	843	TAMBAHAN MODAL DISETOR	1.802	1.802
AKTIVA LAIN-LAIN	4.863	4.615	SALDO LABA		
JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR	539.841	431.983	Sudah ditentukan penggunaannya	7	6
			Belum ditentukan penggunaannya	448.342	82.333
JUMLAH AKTIVA	1.137.082	993.465	JUMLAH EKUITAS	471.221	105.211
			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.137.082	993.465

Catatan : Laporan keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh KAP Siddharta & Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Jakarta, 30 Maret 2011
Direksi Perseroan

